

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Biografi Max Weber

Max Weber adalah seorang sosiolog, filsuf, dan ekonomi terkenal asal Jerman yang lahir pada 21 April 1864 di Erfurt, Thuringia. Latar belakang keluarga Weber cukup menarik, dengan ayahnya yang merupakan seorang birokrat dan ibunya yang seorang Calvinis taat. Perbedaan pandangan dan cara hidup antara kedua orang tuanya menciptakan ketegangan dalam keluarga, yang kemudian mempengaruhi perkembangan kepribadian Weber.¹¹

Setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya, Weber melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg pada usia 18 tahun. Namun, setelah tiga semester, ia meninggalkan studi untuk menjalani wajib militer. Setelah kembali ke Berlin pada tahun 1884, ia menyelesaikan sekolahnya dan menghabiskan waktu delapan tahun untuk mendapatkan gelar Ph.D. Setelah meraih gelar tersebut, Weber berkarir sebagai pengacara dan juga mengajar di Berlin, dimana ia mulai mengembangkan pemikiran-pemikirannya yang mendalam tentang masyarakat dan ekonomi, yang kemudian menjadi landasan bagi teori sosiologi modern.¹²

¹¹ Adi Santoso, *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi (Klasik Sampai Postmodern)* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 13.

¹² Yesmil Anwar dan Adang, *Sosiologi Untuk Universitas* (Bandung: PT Refika Aditama, 2017), 141.

B. Tindakan Sosial Max Weber

Dalam kehidupan seseorang menjalankan tindakan dengan penuh kesadaran yang memiliki tujuan tertentu. Tindakan tersebut biasanya berhubungan dengan individu lain, mengingat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Sesuatu dapat disebut sebagai tindakan sosial hanya jika ia memiliki tujuan dan dapat dipahami dalam konteks hubungan dengan orang lain. Hal ini merupakan inti dari teori tindakan sosial yang diajukan oleh Max Weber.¹³

Max Weber membuat distinctions yang jelas antara tindakan dan perilaku reaktif yang tidak melibatkan pemikiran yang mendalam. Dalam pendekatannya, perilaku lebih cenderung menjadi respons otomatis terhadap sebuah stimulus, tanpa melibatkan proses berpikir yang signifikan. Oleh karena itu, Weber kurang tertarik pada jenis perilaku ini. Sebaliknya, ia lebih memfokuskan perhatian pada tindakan yang secara eksplisit melibatkan pemikiran dan refleksi dalam respon terhadap stimulus yang ada.¹⁴ Max Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan yang memiliki makna dan dapat berdampak pada orang lain. Hal ini menciptakan perbedaan yang jelas antara tindakan individu dan tindakan sosial. Tindakan sosial memiliki dampak yang luas terhadap orang lain, sedangkan

¹³ SVD Bernard Raho, *Sosiologi* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2014), 28.

¹⁴ George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Klasik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 266.

tindakan individu lebih fokus pada diri sendiri. Untuk dianggap sebagai tindakan sosial, suatu tindakan harus diarahkan kepada pihak lain.¹⁵

Max Weber menekankan bahwa penelitian sosiologi fokus pada beberapa aspek utama. Ciri-ciri tersebut meliputi makna subjektif dari tindakan individu, orientasi tindakan tersebut kepada satu atau lebih orang, dampak positif yang diberikan kepada orang lain, perhatian terhadap tindakan individu lain, terjadinya secara langsung oleh pelaku, serta pelaksanaan dengan persetujuan pasif dari pihak lain.¹⁶ Secara keseluruhan, kita dapat mengatakan bahwa tindakan sosial memiliki makna subjektif, ditujukan kepada orang lain, dan memiliki kemampuan untuk berdampak pada tindakan orang lain. Selain itu, tindakan sosial berfungsi sebagai tanggapan terhadap tindakan yang dilakukan oleh orang lain.

Ketika seseorang memberikan makna subjektif terhadap apa yang mereka lakukan, baik itu penting bagi mereka sendiri maupun orang lain, mereka melakukan tindakan sosial yang akan menghasilkan hubungan sosial. Max Weber berpendapat, hubungan sosial melibatkan berbagai aktor yang membawa makna tertentu, yang berhubungan dan diarahkan pada tindakan orang lain. Setiap individu berinteraksi dan merespons satu sama lain, tindakan sosial serta

¹⁵ George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 135.

¹⁶ George Ritzer, *Sosiologi Agama Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali, 2004), 39.

hubungan sosial dapat ditemukan dalam berbagai bentuk empiris yang dapat kita amati.

C. Tipe Tindakan Sosial Menurut Max Weber

Rasionalitas adalah konsep fundamental yang digunakan oleh Max Weber untuk mengklasifikasikan berbagai jenis tindakan sosial. Menurut Weber, tindakan orang didasarkan pada pengalaman, persepsi, dan pemahaman mereka tentang suatu objek dalam konteks situasi tertentu. Dengan demikian, tindakan sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial yang terjadi, karena sebuah tindakan dapat dianggap sah jika individu tidak memiliki tujuan yang jelas dalam melakukannya. Dalam hal ini, rasionalitas dapat dipahami sebagai perilaku individu yang berusaha memaksimalkan keuntungan dari aktivitas produktif mereka. Selain itu, hubungan pertukaran yang terjadi dalam masyarakat dianggap sebagai hasil kompleks dari tindakan individu tersebut.¹⁷

Konsep rasionalitas adalah kunci penting dalam analisis objektif terhadap makna subjektif serta perbandingan berbagai jenis tindakan sosial. Dengan pendekatan objektif, seorang aktor berinteraksi hanya dengan fenomena yang dapat kita amati bahwa pendekatan objektif berfokus pada aspek-aspek yang terlihat, seperti halnya dengan objek fisik dan perilaku yang tampak. Di sisi lain, pendekatan subjektif lebih menekankan pada faktor-faktor yang sulit diukur, seperti perasaan, pikiran, dan berbagai motivasi lainnya. Perbandingan antara

¹⁷ John Scott, *Teori Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 121.

kedua pendekatan ini menjadi sangat jelas. Pendekatan subjektif memperhatikan bagaimana individu menjalani pengalaman objektif yang kemudian dibagikan dalam konteks kelompok sosialnya yang dapat dipahami sebagai suatu pengalaman bersama. Sebaliknya, pengalaman subjektif bersifat pribadi dan sulit untuk dikomunikasikan atau dipahami oleh orang lain, meskipun bagi individu tersebut terasa sangat nyata.¹⁸ Max Weber mengidentifikasikan empat jenis tindakan sosial dasar yang berperan penting dalam mempengaruhi perilaku individu.

1. Rasionalitas Berorientasi Nilai (Werk rational)

Tindakan dapat dipahami sebagai suatu aktivitas yang diawali dengan pemikiran rasional dan memperhatikan berbagai nilai etis, estetis, serta religious, tanpa terpengaruh oleh prospek keberhasilannya. Tindakan ini mirip dengan apa yang disebut sebagai rasionalitas instrumental. Dalam hal ini, individu bertindak dengan mempertimbangkan yang matang dan memiliki tujuan yang jelas, sambil tetap mengintegrasikan nilai-nilai agama, hukum, serta prinsip-prinsip dasar yang relevan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam masyarakat, terdapat beragam nilai yang meliputi nilai-nilai religius, etis, hukum, dan berbagai keyakinan lain yang dipegang secara bersama-sama. Setiap kelompok masyarakat dan individu memiliki pandangan yang

¹⁸ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Jakarta: PT Gramedia, 1986), 219.

berbeda tentang prinsip ini, sehingga tindakan sosial yang dilakukan oleh masing-masing aktor memiliki arti yang berbeda-beda.¹⁹

2. Rasionalitas Instrumental (Zweckrational)

Tindakan sosial yang berlandaskan rasionalitas instrumental adalah yang paling rasional. Dalam hal ini, individu secara sadar memilih baik tujuan atau alat yang akan digunakan untuk meraihnya. Dengan kata lain, tindakan rasionalitas instrumental adalah perilaku sosial yang dilakukan berdasarkan keputusan yang diambil dengan kesadaran penuh, yang berkaitan dengan tujuan serta sarana yang ada untuk mencapainya.²⁰

Sebelum melakukan tindakan ini, individu melalui proses pertimbangan yang matang mengenai tujuan yang ingin diraih dan cara yang akan dipilih. Tindakan atau perilaku ini jelas diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu, dimana setiap langkah sudah dipikirkan dengan seksama. Dalam melakukan tindakan ini, seseorang sepenuhnya menyadari apa yang dilakukannya serta tujuan dari tindakan itu.²¹

Dalam pemilihan umum, masyarakat yang bergabung dalam kelompok agama tertentu mungkin memilih calon dengan pertimbangan apa yang bisa didapatkan dari calon tersebut jika terpilih, seperti program pembangunan yang sejalan dengan kepentingan kelompok agama mereka. Hal ini menunjukkan

¹⁹ Ibid, 221.

²⁰ Ibid, 220

²¹ George Ritzer and Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1995), 101.

bahwa agama dapat berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan praktis dalam politik, yang mencerminkan tindakan sosial rasional instrumental sesuai pandangan Weber.

3. Tindakan Afektif (Affectual Rational)

Keadaan emosi seseorang mempengaruhi tindakan afektif mereka, tanpa melibatkan proses pemikiran yang rasional. Tindakan afektif dilakukan secara spontan, tanpa perencanaan atau kesadaran penuh dari individu. Dengan demikian, reaksi yang muncul adalah hasil dari perasaan langsung yang menggerakkan aktor untuk bertindak.²²

Tindakan afektif adalah ekspresi spontan emosi dan perasaan tanpa pertimbangan rasional. Reaksi emosional seperti cinta, marah, takut, atau gembira diungkapkan secara langsung tanpa proses berpikir atau perencanaan. Sifat sepenuhnya tidak rasional karena tidak dipengaruhi oleh logika, ideologi atau pemikiran yang terstruktur.

Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa selama pemilihan umum, banyak masyarakat desa Rambusaratu memilih calon berdasarkan kedekatan emosional atau afeksi terhadap tokoh agama atau pemimpin yang dianggap mewakili aspirasi mereka. Misalnya, seorang pemimpin yang memiliki hubungan emosional yang kuat dengan masyarakat dan dipandang sebagai orang agama

²² George Ritzer and Jeffrey Stepnisky, *Teori Sosiologi Klasik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 267.

yang taat dapat mempengaruhi pilihan politik mereka, meskipun tidak ada pertimbangan rasional atau instrumental yang jelas.

4. Tindakan Tradisional

Tindakan tradisional, menurut Max Weber adalah perilaku kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun tanpa pertimbangan rasional. Individu bertindak berdasarkan kebiasaan yang sudah mapan tanpa memahami alasan di baliknya.²³ Tindakan ini berakar pada praktik-praktik masa lalu yang diwariskan antar generasi. Tindakan tradisional adalah jenis tindakan sosial yang tidak didasarkan pada pemikiran rasional. Ketika seseorang berperilaku berdasarkan kebiasaan, tanpa melakukan refleksi atau perencanaan yang sadar, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional. Apabila dimintai penjelasan mengenai tindakannya, individu tersebut biasanya akan menjawab bahwa ia selalu bertindak seperti itu, atau menganggap perilaku tersebut sebagai kebiasaan yang sudah melekat padanya. Jika orientasi semacam ini dominan dalam suatu kelompok atau masyarakat, kebiasaan dan institusi mereka dilestarikan akan diakui atau didukung oleh tradisi yang telah ada lama, dan diterima tanpa dipertanyakan. Pembeneran yang diberikannya hanya sebatas, “inilah cara yang telah dilakukan oleh nenek moyang kami, dan juga oleh nenek moyang mereka sebelumnya ini adalah cara yang sudah ada dan akan terus ada”.

²³ Ibid, 136-138.

Beberapa orang mungkin memilih calon berdasarkan kebiasaan atau tradisi yang telah ada secara turun-temurun. Dalam beberapa kasus, masyarakat desa dapat memilih calon berdasarkan desa dapat memilih calon berdasarkan latar belakang etnis atau agama yang merupakan tradisi dalam keluarga mereka. Dalam hal ini, agama berperan sebagai faktor mobilisasi sosial yang terkait dengan kebiasaan dan norma yang berlaku dalam komunitas mereka, meskipun pilihan tersebut tidak selalu berlandaskan pemikiran rasional.

D. Agama sebagai Tindakan Sosial

1. Pengertian Agama

Kata agama dalam bahasa Indonesia dan kata “Diin” dalam bahasa Arab umumnya digunakan untuk merujuk pada agama, dengan makna yang serupa dalam bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Inggris “religion”, bahasa Prancis “la religion”, bahasa Belanda “de religie”, dan bahasa Jerman “die religion”. Sementara “Diin” dalam arti sempit berarti hukum atau aturan, makna bahasa Arabnya yang lebih luas mencakup konsep-konsep seperti ketundukan, kepatuhan, adat istiadat, dan pembalasan. Meskipun ada perbedaan etimologis, “Diin” sering diterjemahkan sebagai agama yang sama.²⁴

Beberapa cendekiawan menawarkan perspektif yang berbeda tentang definisi agama. Harun Nasution mendefinisikan agama sebagai sistem

²⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 63.

kepercayaan dan perilaku yang berasal dari kekuatan supranatural. Al-Syahrastani memandangnya sebagai sistem kekuasaan dan kepatuhan, terkadang ditafsirkan sebagai pembalasan dan pertanggungjawaban atas tindakan akhirat.²⁵

Bouquet menggambarkan agama sebagai hubungan permanen antara manusia dan makhluk suci supranatural Tuhan yang memiliki kekuasaan absolut. Pemerintah Indonesia awal, di bawah Soekarno, mengusulkan definisi agama sebagai cara hidup yang didasarkan pada kepercayaan pada satu Tuhan, yang dipandu oleh kitab suci dan seorang nabi.²⁶

Sehingga, meskipun agama berbeda istilah dan makna dalam berbagai bahasa, secara umum dipahami sebagai sistem kepercayaan dan aturan hidup yang melibatkan hubungan manusia dengan kekuatan supranatural, serta mencakup aspek kepatuhan, hukum, dan moral.

E. Pengaruh Agama dalam Tindakan Sosial

1. Sistem Berpikir

Menurut Hidayatno, berpikir adalah aktivitas mental untuk memperoleh pengetahuan, proses kognitif yang menghasilkan ide, pengetahuan, prosedur, argumen, dan keputusan.²⁷ Salamun mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan elemen yang berhubungan dan membentuk fungsi tertentu.²⁸

²⁵ M. Ali Yatim Abdullah, *Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Amzah, 2004), 5.

²⁶ Abu Ahmadi, *Sejarah Agama* (Solo: CV. Ramadhani, 1984), 14.

²⁷ A Hidayatno, "Berpikir Sistem: Pola Berpikir Untuk Pemahaman Masalah Yang Lebih Baik.," *ResearchGate*, 2016.

²⁸ Salamun, "SISTEM MONITORING NILAI SISWA BERBASIS ANDROID," *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Univrab 2* (2) (2017): 99–109.

Berpikir sistem adalah pendekatan untuk memandang permasalahan secara menyeluruh, memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih terarah dan efektif dalam mengubah sistem.. Rohmadi menyatakan berpikir sistem menghasilkan pemikiran yang berdampak pada tindakan atau perilaku.²⁹

2. Perilaku

Sarwono mendefinisikan perilaku sebagai tindakan nyata yang dilakukan oleh orang dengan orang lain. Perilaku, tidak seperti pikiran atau perasaan, adalah sesuatu yang nyata dan dapat diamati, dicatat, dan dipelajari.³⁰ Menurut Walgito, ada dua jenis perilaku: perilaku yang tampak (perilaku terbuka) dan perilaku yang tidak tampak (perilaku batin). Selain aktivitas motorik, aktivitas ini juga mencakup aktivitas emosional dan kognitif.³¹

Chaplin membahas perilaku dalam dua cara. Dia mengatakan bahwa itu adalah segala sesuatu yang dialami seseorang dalam arti luas. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah segala sesuatu yang termasuk reaksi yang dapat diamati.³² Berdasarkan penjelasan diatas, perilaku dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan manusia sebagai respons terhadap stimulus lingkungan, termasuk aktivitas motorik, emosional, dan kognitif.

²⁹ Rohmadi S. H, "Pengembangan Berpikir Kritis (Critical Thinking) Dalam Alquran :Perspektif Psikologi Pendidikan," *Jurnal Psikologi Islam*, 2018.

³⁰ Sarwono S, *Teori-Teori Psikologi Sosial* (Jakarta: CV. Rajawali, 1993).

³¹ Walgito B, *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar) Edisi Revisi* (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset, 1994).

³² Chaplin J.P, *Kamus Lengkap Psikologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).

F. Mobilisasi Sebagai Tindakan Sosial

1. Pengertian Mobilisasi

Teori mobilisasi, menurut Karp dan Banducci, menjelaskan bagaimana hubungan sosial antara individu dan partai politik berkembang. Proses mobilisasi ini terdiri dari tiga dimensi: kognitif (proses pemahaman kepentingan), afektif (pembentukan komunitas), dan instrumental (pemanfaatan instrumen). Mobilisasi politik, secara khusus diartikan sebagai upaya aktor untuk mempengaruhi distribusi kekuasaan.³³ Partisipasi politik mencakup keterlibatan masyarakat di seluruh tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan keputusan hingga evaluasi keputusan tersebut, serta kesempatan untuk berperan dalam pelaksanaan keputusan.

2. Praktek Mobilisasi

Firmansyah menjelaskan bahwa partai politik memanfaatkan sumber daya mereka melalui political marketing untuk menjalankan mobilisasi. Political marketing, meskipun masih relatif baru, telah menjadi tren dalam politik negara-negara demokrasi maju. Partai dan kandidat menggunakannya untuk memobilisasi pemilih, mendapatkan dukungan dalam pemilu, dan memelihara citra publik. Intinya, political marketing menjadi strategi kunci dalam mobilisasi politik.³⁴

³³ Jeffrey Karp and Susan Banducci, "Party Mobilization and Political Participation in New and Old Democracies. Party Politics," *Ilmu Politik* VOL 13. No (2007): 217–234.

³⁴ Firmansyah, *Marketing Politik: Antara Pemahaman Dan Realitas* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 21.

Menurut Nursal, marketing politik pada dasarnya adalah strategi kampanye yang bertujuan membentuk persepsi dan makna politik tertentu di benak pemilih. Makna-makna ini kemudian akan membentuk orientasi perilaku pemilih, mengarahkan mereka untuk memilih kandidat atau partai tertentu. Output utama marketing politik adalah pembentukan makna ini, yang secara langsung mempengaruhi pilihan pemilih pada saat pencoblosan.³⁵ Dengan kata lain, marketing politik berupaya mempengaruhi pilihan pemilih melalui manipulasi persepsi dan makna.

Keterlibatan warga negara dalam proses politik tidak hanya berarti dukungan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh pemimpin, karena jika demikian, mobilisasi politik adalah pilihan yang lebih tepat. Penting untuk diingat bahwa pengendalian terhadap partisipasi politik yang berlebihan dalam mobilisasi pada pemilihan kepala daerah dapat menyebabkan krisis partisipasi politik, seperti yang dikemukakan oleh Myron Weiner.³⁶ Hal ini berujung pada perilaku politik masyarakat yang tidak rasional. Selain kontrol yang dilakukan oleh aparat pemerintahan, irasionalitas dalam pendidikan politik masyarakat juga disebabkan oleh terhambatnya akses terhadap pendidikan politik yang seharusnya dioptimalkan oleh organisasi yang bukan pemerintahan dan terganggunya demokrasi oleh perilaku elit politik yang tidak demokratis.

³⁵ Admad Nursal, *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 295-298.

³⁶ Myron Weiner, *Modernisation The Dynamic Of Growth* (New York: Basic Books, 1986).

3. Jenis Mobilisasi

Menurut Nedelman, terdapat dua jenis mobilisasi, yaitu: langsung dan tidak langsung.

a. Mobilisasi Langsung

Mobilisasi langsung ini melibatkan pengarahannya langsung kepada pemilih untuk melakukan tindakan politik sesuai keinginan partai. Contohnya termasuk instruksi langsung dari partai kepada anggota, serta aksi-aksi nyata seperti demonstrasi atau konvoi. Metode ini menekankan pada tindakan fisik dan keterlibatan langsung.

b. Mobilisasi tidak Langsung

Jenis ini berfokus pada mempengaruhi cara berpikir dan pandangan pemilih, sehingga mereka secara mandiri mengambil keputusan politik sesuai dengan yang diinginkan partai. Contohnya termasuk kampanye media, iklan politik, seminar, dan dialog publik. Metode ini lebih menekankan pada persuasi dan perubahan persepsi.

Dengan gaya politik mobilisasi ini, masyarakat menjadi apatis terhadap pemilu dan tindakan yang berkaitan dengan mobilisasi massa. Salah satu pengukuran yang paling mudah adalah tingkat golput. Dalam kehidupan nasional, kepercayaan berlebihan terhadap para pemimpin mengingatkan mereka merasa didukung oleh mayoritas, justru semakin menjauhkan proses pengambilan keputusan dari konstituen masyarakat. Mekanisme di partai politik menjadi tertutup terhadap partisipasi warga.

Ketika diminta untuk memberikan suara, banyak warga yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai selain apa yang disajikan oleh media dan pihak berkepentingan lainnya.

Jeffrey mengemukakan bahwa dalam sistem pemilu yang berbasis pada kandidat, terdapat kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kekuatan lebih dalam melakukan mobilisasi. Para calon legislatif dari partai, pada umumnya akan melaksanakan gerakan politik yang bersifat independen. Kekuatan mobilisasi politik ini seringkali mendorong para calon legislatif untuk melakukan mobilisasi secara mandiri, meskipun terlepas dari dukungan partai mereka.³⁷

Tindakan sosial dan mobilitas sosial memiliki hubungan yang kuat satu sama lain dan berdampak pada satu sama lain. Aktivitas sosial yang dilakukan individu, yang memiliki makna dan ditujukan kepada orang lain, menjadi landasan bagi terbentuknya mobilisasi sosial yang lebih luas dan terorganisir. Dalam konteks ini, agama berfungsi sebagai sumber nilai dan makna yang signifikan, serta dapat mendorong tindakan sosial yang pada gilirannya memicu mobilisasi sosial. Pandangan dari tokoh-tokoh sosiologi terutama Max Weber memperkuat konsep ini, dimana tindakan sosial dipandang sebagai fenomena mikro, sementara mobilisasi sosial merupakan manifesto makro dari kumpulan tindakan tersebut.

³⁷ Jeffrey I. Chapman, "Local Government Autonomy and Fiscal Stress: The Case of California Counties," *State and Local Government Review*, 2003.